



**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI  
KELURAHAN KARAWANG KULON**

**Gita Andini, Dadan Kurniansyah, Kariena Febriantini**

Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Abstrak**

Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai salah satu langkah dalam mengatasi permasalahan sosial, salah satunya kemiskinan. Relevansi antara peran Pemerintah Kelurahan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu sudah sejauh mana partisipasinya dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran pemerintah kelurahan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon. Metode yang digunakan adalah kualitatif yakni dengan wawancara dan observasi yang memberikan gambaran tentang bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai peran regulator, pemerintah kelurahan belum memiliki peraturan sekaligus arahan khusus terkait BPNT dan PKH. Sebagai peran dinamisator yaitu mampu mengadakan kegiatan pelatihan. Sebagai peran fasilitator yaitu hanya mampu memberikan bantuan berupa barang saja. Sebagai peran katalisator yaitu belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan belum melakukan promosi potensi wilayah.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan ekonomi sosial yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika berbicara mengenai kemiskinan yang berhubungan dengan penyebab, penanggulangan, serta cara untuk mengatasinya seperti tidak akan ada habisnya. Menurut Suparlan dalam Nindatu (2019) kemiskinan dipandang sebagai suatu standar hidup di tingkatan yang rendah dan kekurangan materi yang dialami oleh sejumlah orang jika dibandingkan dengan standar kualitas yang pada umumnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian Setyadi dan Indriyani (2021) memaparkan bahwa angka kasus positif Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini disebabkan jika orang yang terkonfirmasi Covid-19 semakin tinggi, maka jumlah kemiskinan akan semakin meningkat di negara tersebut. Pandemi Covid-19 menghadirkan dampak yang signifikan yakni mengganggu kegiatan ekonomi yang pada akhirnya membawa dampak terhadap pendapatan masyarakat.

Sebagai salah satu kabupaten di negara Indonesia, pemerintah pusat telah menetapkan kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah yang memasuki zona ekstrim kemiskinan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang dalam Ramadhan (2021) terdapat 106.780 penduduk Karawang yang tersebar di 25 desa dikategorikan sebagai ekstrim kemiskinan.

Masalah kemiskinan seperti yang telah dijelaskan juga dapat ditemukan pada masyarakat di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat. Sebagai usaha dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Kelurahan Karawang Kulon sangat berhubungan dengan adanya kepedulian dari pemerintah setempat, yaitu dari pemerintah Kelurahan Karawang Kulon. Karena Pemerintah kelurahan menjadi

fokus perhatian dan titik sentral terhadap masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Menurut Musa (2017) pemberdayaan masyarakat merupakan fokus publik serta dipandang sebagai salah satu langkah yang selaras dalam mengatasi permasalahan sosial, terlebih lagi mengenai kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan oleh berbagai elemen yang dimulai dari pemerintah, dunia usaha serta masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil.

Relevansi antara peran Pemerintah Kelurahan dengan pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2021) yaitu sudah sejauh mana partisipasinya dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, perlu diketahui bagaimana perannya dari setiap lembaga dalam melaksanakan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan. Karena dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, sasaran utama yang diharuskan yaitu masyarakat yang tidak berdaya (miskin) dalam arti luas serta secara konkret sebagian besar yang miskin adalah daerah perkotaan. Kelembagaan Komunitas Lokal adalah representasi dari lembaga masyarakat lokal yang diciptakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses perubahan sosial yang diakui serta dapat diterima oleh masyarakat.

Pemberdayaan menjadi elemen utama yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Berkaitan dengan pemberdayaan, pemerintah memiliki peran serta didalamnya yang dimana perlu dilakukan agar dapat berjalan selaras dengan harapan masyarakat. Terdapat 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori Arifin (2012) diantaranya: Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator

dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan Karawang Kulon. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran pemerintah kelurahan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yang dimana instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna terhadap data yang sebenarnya, yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan observasi suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu langkah untuk mengentaskan masalah kemiskinan di tingkat kelurahan yaitu dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Kelurahan. Sehingga dibutuhkan seberapa jauh peran pemerintah kelurahan dalam mengentaskan kemiskinan. Maka untuk menganalisa mengenai peran pemerintah kelurahan dalam

pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan Karawang Kulon, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arifin (2012) bahwa terdapat beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya: Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator.

### **1. Peran Regulator Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon**

Sebagai regulator, pemerintah kelurahan menerbitkan peraturan serta program-program tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, menyediakan pedoman dasar yang selanjutnya dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagai instrument guna mengelola setiap aktifitas dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kelurahan sebagai regulator yang telah dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan hadirnya program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kelurahan Karawang Kulon. Berdasarkan paparan Lurah Karawang Kulon, terdapat 910 penerima BPNT dan 525 penerima PKH. Pemberian program bantuan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon.

Berhasil tidaknya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program BPNT dan PKH ditentukan oleh pemerintah kelurahan, karena program ini dilaksanakan di setiap kelurahan. Selain pemerintah kelurahan, aktor pelaksana program BPNT dan PKH juga dilakukan oleh pihak

lain. Program PKH dibantu oleh pendamping PKH sedangkan program BPNT dibantu oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang dimana aktor pelaksanaannya terdiri dari Lurah, Koordinator Kelurahan dan Ketua E-Warong.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di Kelurahan Karawang Kulon mengatakan bahwa dengan program BPNT yang diberikan setidaknya dapat meminimalisir beban pengeluaran kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat. Rincian kebutuhan pangan yang diberikan berupa beras, ayam, telur, kacang-kacangan seperti kacang hijau juga termasuk tempe dan tahu, sayuran dan buah-buahan. Hadirnya PKH juga mampu membantu masyarakat yang berkategori miskin mendapatkan akses pelayanan sosial seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, serta pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program BPNT dan PKH cukup berjalan dengan baik, karena kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat. Sehingga memiliki dampak untuk mengentaskan kemiskinan dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kelurahan Karawang Kulon.

Selama ini, mekanisme penyaluran BPNT dan PKH hanya mengacu kepada peraturan menteri sosial untuk dijadikan pedoman dasar dalam pelaksanaannya. Mekanisme penyaluran BPNT mengacu kepada Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019. Sedangkan mekanisme penyaluran PKH mengacu kepada Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018. Tidak dapat dipungkiri, untuk mendapatkan program BPNT dan PKH masih dirasakan sulit. Terdapat sebagian masyarakat yang masih belum mendapatkan program bantuan tersebut, meskipun sudah memenuhi kriteria KPM. Dengan demikian, hal ini masih menjadi kendala dalam

pelaksanaannya dan belum ada peraturan sekaligus arahan yang khusus dari pemerintah kelurahan terkait hal ini.

## 2. Peran Dinamisator Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon

Sebagai dinamisator, pemerintah kelurahan memiliki peran secara terpadu dalam memberikan pelatihan, bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat untuk memiliki kepedulian serta berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kelurahan sebagai dinamisator yaitu dengan mengadakan pelatihan. Lurah Karawang Kulon mengatakan bahwa terdapat beberapa kegiatan pelatihan di Kelurahan Karawang Kulon, diantaranya pelatihan tata rias. Peserta pelatihan tata rias diikuti oleh ibu rumah tangga dan juga remaja perempuan yang berkeinginan membuka usaha sendiri dan ingin mahir dalam merias pengantin.

Selanjutnya pelatihan jahit menjahit. Pelatihan ini diikuti oleh masyarakat yang sebagian sebagai ibu rumah tangga dan juga masyarakat yang terkena korban PHK. Selama dua minggu, masyarakat diberikan pengarahan berupa materi, yang dimulai dari materi dasar sampai dengan praktiknya untuk membuat produk. Masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan pelatihan ini.

Kemudian pelatihan tata boga. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh masyarakat di Kelurahan Karawang Kulon yang memiliki keinginan dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka di bidang memasak. Dalam hal ini, masyarakat diberikan bekal materi memasak sampai dengan praktiknya. Pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi nilai ekonomi yang dimana dapat menunjang

keterampilan mereka baik dalam dunia wirausaha maupun dunia kerja.

Mengingat lahan pekarangan dapat dijadikan sebagai sumber pangan dan sumber penghasilan, pemerintah kelurahan Karawang Kulon mengadakan pelatihan budidaya tanaman seperti tanaman cabai, sawi, bayam, selada dan pakcoy. Kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pemaparan materi mengenai budidaya tanaman yang baik, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta praktik budidaya menanam sayuran yang dapat dijadikan nilai ekonomi.

Dalam hal ini realisasi kegiatan pelatihan yang dicanangkan oleh pemerintah kelurahan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan, keterampilan, arahan dan bimbingan kepada masyarakat dan juga dapat membantu masyarakat miskin guna menghasilkan mata pencahariannya sendiri atau membantu meningkatkan keterampilan mereka untuk mencari peluang pekerjaan di luar wilayahnya.

Inilah yang menjadi peran penting dan strategis dari pemerintah kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan guna meningkatkan keahlian kelompok masyarakat yang berkategori miskin dan tertinggal untuk segera menyiapkan diri agar secara mandiri mampu melaksanakan kegiatan pelatihan yang dicanangkan oleh pemerintah kelurahan sehingga dapat menjadi nilai ekonomi dan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup.

Kesadaran masyarakat adalah kunci utama untuk mendukung kelancaran pemberdayaan. Sebelum kegiatan pelatihan-pelatihan dimulai, pemerintah kelurahan terlebih dahulu mengumpulkan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Namun, kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masih rendah.

Kendala yang dirasakan oleh pemerintah Kelurahan Karawang Kulon yaitu kurang minatnya masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang telah dicanangkan. Sehingga dapat dikatakan hanya sedikit masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Dan juga terdapat sebagian sikap masyarakat yang terkesan acuh dalam menanggapi kegiatan pelatihan.

### 3. Peran Fasilitator Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon

Sebagai fasilitator, pemerintah kelurahan dalam hal ini berusaha untuk memfasilitasi dan menciptakan kondisi yang aman dan nyaman juga memberikan sarana dan prasarana pembangunan diantaranya berupa pendampingan, pendanaan dan permodalan.

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karawang Kulon mencakup proses yang dimana usaha atau potensi yang berasal dari masyarakat kemudian diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah kelurahan, guna membantu memperbaiki perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu memberikan bantuan mengenai apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat di Kelurahan Karawang Kulon.

Terdapat beberapa usaha bersama masyarakat yang sampai saat ini masih berkembang, diantaranya: Pertama, usaha kue semprong. Pemerintah kelurahan memberdayakan usaha kue semprong dengan memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan kue semprong, seperti oven dan mixer. Kedua, usaha ternak lele. Uniknya,

masyarakat juga memiliki usaha dalam mengembangkan budaya Azolla sebagai langkah yang mudah untuk membuat pakan lele yang menggunakan tanaman paku yang biasanya mengapung di atas air. Untuk memberdayakan usaha tersebut, pemerintah kelurahan memberikan bantuan berupa benih ikan lele. Pemerintah kelurahan juga memberikan pemahaman mulai dari pembuatan kolam yang baik, penebaran benih, proses pemeliharaan, penanggulangan penyakit, sampai dengan panen, produksi dan pemasaran. Ketiga, usaha gorengan tempe. Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan usaha gorengan tempe yaitu dengan memberikan bantuan berupa peralatan penggorengan.

Mengingat poin penting pemerintah kelurahan dalam proses pengentasan kemiskinan yaitu dapat ditempuh dengan cara menumbuhkan iklim usaha agar masyarakat yang berkategori miskin dapat diberdayakan. Hal ini menciptakan wirausaha baru dengan menggali kemampuan untuk mengelola usaha masyarakat bersama yang terorganisasi. Berdasarkan apa yang telah diuraikan, peran pemerintah kelurahan sebagai fasilitator disini hanya menekankan kepada pemberian bantuan berupa barang saja, pemerintah kelurahan belum memberikan bantuan berupa permodalan atau pendanaan.

#### 4. Peran Katalisator Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon

Sebagai katalisator, pemerintah kelurahan diposisikan sebagai agen yang dapat melajukan pengembangan potensi di tingkat kelurahan. Dalam hal ini berkaitan dengan pemerintah kelurahan dalam memandang dan mengkordinir faktor apa saja yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.

Salah satu langkah pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan yaitu dapat dilakukan dengan menggali potensi di wilayahnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah kelurahan dapat mengembangkan potensi di wilayahnya untuk dijadikan nilai jual. Pemerintah kelurahan juga perlu menyediakan peluang-peluang yang ada agar masyarakat dapat diberdayakan. Potensi yang dimiliki di wilayah Kelurahan Karawang Kulon mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya tersebut dipandang sebagai bahan dasar yang akan dikelola kemudian dikembangkan untuk kelangsungan dan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, di Kelurahan Karawang Kulon memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan diantaranya di bidang peternakan meliputi peternakan ayam, bebek, kambing dan lele. Di bidang pertanian meliputi cabai, sawi, bayam, pakcoy, dan selada. Dan juga memiliki potensi beberapa produk makanan olahan seperti gorengan tempe, keripik pisang, kue semprong, dan aneka kerupuk. Adapun sumber daya manusia merupakan masyarakat di Kelurahan Karawang Kulon itu sendiri sebagai sumber tenaga kerja untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya. Potensi-potensi tersebut dijadikan upaya pemberdayaan bagi masyarakat yang berkategori miskin untuk memberikan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hingga saat ini pemerintah kelurahan Karawang Kulon masih menggali potensi apa saja yang dimiliki masyarakat agar dapat meningkatkan nilai ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Karawang Kulon untuk mengembangkan potensi wilayahnya yaitu dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat ketika

diadakan kegiatan-kegiatan pertemuan seperti rapat. Dalam rapat tersebut, pemerintah kelurahan selalu memberikan informasi mengenai potensi dan peluang-peluang apa saja yang dapat dikembangkan di Kelurahan Karawang Kulon guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun sayangnya dalam rapat tersebut hanya dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat. Sehingga penyampaian informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat secara langsung. Mengingat antusias masyarakat juga beragam pada saat menghadiri rapat, sebagian ada yang aktif akan tetapi lebih banyak yang hanya sekedar mendengarkan saja.

Saat ini yang terjadi di Kelurahan Karawang Kulon mengenai pengembangan potensi wilayah belum berjalan selaras dengan apa yang diharapkan. Karena upaya dari pemerintah kelurahan untuk menginformasikan potensi wilayah ternyata belum cukup menumbuhkan partisipasi masyarakat agar pro aktif dalam mengembangkan potensi wilayah dan juga belum dilakukan promosi mengenai potensi apa saja yang ada di wilayah Karawang Kulon.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran regulator pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon belum optimal karena mekanisme penyaluran BPNT dan PKH hanya mengacu kepada peraturan menteri sosial, belum ada peraturan sekaligus arahan yang khusus dari pemerintah kelurahan sehingga untuk mendapatkan program BPNT dan PKH masih dirasakan sulit bagi masyarakat meskipun sudah memenuhi kriteria KPM.

Sebagai peran dinamisor, sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari

adanya kegiatan pelatihan-pelatihan seperti tata rias, jahit menjahit, tata boga dan budidaya tanaman yang dicanangkan oleh pemerintah kelurahan dalam rangka membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan keterampilan dan membantu menghasilkan nilai ekonomi. Namun kendalanya terletak dari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan.

Sebagai peran fasilitator, belum optimal. Dikarenakan pemerintah kelurahan hanya menekankan kepada pemberian bantuan berupa barang saja, pemerintah kelurahan belum memberikan bantuan berupa permodalan atau pendanaan untuk memberdayakan usaha yang dimiliki masyarakat.

Selanjutnya sebagai peran katalisator belum optimal karena pemerintah kelurahan belum mampu untuk mendorong partisipasi masyarakat agar pro aktif dalam mengembangkan potensi wilayah dan belum melakukan promosi mengenai potensi yang ada di wilayah Karawang Kulon.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, S. (2012). Ilmu dan Seni Kepemimpinan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Musa. (2017). Optimalisasi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 8 (1): 109

Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Perspektif Komunikasi, 3 (2): 96

Ramadhan, B. (2021). Bappeda Karawang: Kemiskinan Ekstrem Tersebar di Pedesaan. Diunduh di <https://m.republika.co.id/berita/r1ionm330/bappeda-karawang-kemiskinan-ekstrem-tersebar-di-pedesaan> tanggal 11 Februari 2022

Setyadi, S. & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4 (1): 62

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto. (2021). Keberhasilan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Semarang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14 (1): 43